



**RILIS KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI V DPR RI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

=====

Dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan ketiga atas UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 20 – 22 Juni 2024. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI; pejabat dari Ditjen Perhubungan Laut, Darat, dan Udara Kementerian Perhubungan; Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya Kementerian PUPR; BMKG; serta Badan Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/Basarnas. Selain itu, hadir juga Direksi PT Pelindo, Direksi PT Pelni, Direksi PT ASDP. Dari Pemerintah Daerah diwakili Asisten 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pj. Bupati Mempawah, beserta SKPD terkait.

Sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain peninjauan Pelabuhan Internasional Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, pertemuan untuk mendapatkan masukan dan saran atas revisi UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. “Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan agar Komisi V DPR RI dapat melihat dan mendengarkan secara langsung upaya-upaya yang akan dilakukan terhadap pengelolaan Pelabuhan serta kendala atas pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran”, ungkap Lasarus M.Sos., M.Si., Ketua Komisi V DPR RI.

Adapun tujuan dari penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, antara lain untuk mewujudkan kedaulatan dan meningkatkan peran dunia pelayaran Indonesia terkait penerapan Asas Cabotage, mewujudkan biaya logistik pelayaran yang murah dan efisien, meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, meningkatkan nilai *Logistic Performance Index* (LPI) dalam penyelenggaraan kepelabuhan di Indonesia, mendorong pemberdayaan pelayaran rakyat, pengawasan pengelolaan Terminal Khusus (TK) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), serta memperjelas kedudukan dan status kelembagaan Penjaga Laut Dan Pantai.

Komisi V DPR RI menilai bahwa, urgensi perubahan Undang-Undang tentang Pelayaran, selain untuk sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, terdapat juga beberapa permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum yang dirasa perlu direspons dengan bijaksana dan analisis yang kuat yang juga mempertimbangkan masukan dan usulan dari *stakeholder* dibidang Pelayaran untuk menyempurnakan undang-undang ini.

Menurut Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus M.Sos., M.Si., masih ada praktek-praktek kongkalikong dalam kepemilikan usaha angkutan laut di dalam negeri dan praktek pinjam nama (*nominee*) masih ditemukan di lapangan. Hal ini menjadikan ada kapal berbendera Indonesia namun sebenarnya status kepemilikannya dikuasai oleh pengusaha asing, sehingga perlunya melakukan penindakan yang tegas bagi perusahaan pelayaran nakal yang beroperasi di laut Indonesia.

Terkait obyek kunjungan Pelabuhan Kijing, PT Pelindo diminta untuk meningkatkan penyerapan aspirasi, partisipasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Pelabuhan. Jangan sampai malah menjadi momok masalah kemacetan, ketersediaan air, maupun akibat lingkungan yang mengundang protes warga sekitar. Selain itu, diperlukan sinergi dengan teknis dan anggaran APBN dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian PUPR untuk dukungan infrastruktur aksesibilitas jalan sekitar yang lebih memadai, mendorong percepatan pembangunan jalan tol Kijing, dan dukungan pasokan air baku maupun air minum dan sarana prasarana pendukung lainnya; BMKG untuk dukungan informasi maritim; serta BNPP/Basarnas untuk antisipasi pencarian dan pertolongan.

**Mempawah, 20 Juni 2024**  
**Tim Kunfik Ke Kalbar**